

Laporan Pengelolaan Informasi dan Masalah

Periode November 2019

1. Periode Pengelolaan Informasi dan Masalah

Periode Penyampaian Informasi dan Masalah dalam laporan ini yaitu meliputi permintaan informasi dan penyampaian masalah yang masuk dalam rentang bulan November 2019.

2. Jumlah Permintaan Informasi dan Penyampaian Masalah/Aduan

Jumlah Permintaan Informasi dan Masalah yang masuk dalam rentang bulan November 2019 yaitu sebanyak 12 item yang berasal dari Sigi dan Palu. Sebanyak 6 item berasal dari Sigi dan 6 item berasal dari Palu. Adapun Daftar Permintaan Informasi dan Masalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Daftar Permintaan Informasi dan Masalah

No	Nama Kota/Kabupaten	Tanggal Pengaduan	Isi Pengaduan
1	SIGI	27/11/2019	Terkait <i>data by name by address</i> , di Sibalaya Utara terdapat rumah tetapi pemiliknya ber-KTP di Kalimantan, dan ada warga yang memiliki gilingan di Sibalaya Utara. Bagaimana untuk solusinya?
2	SIGI	27/11/2019	Apakah lahan calon huntap yang berasal dari Pak Kasim sudah dibeli pemerintah atau sudah dihibahkan? Dan berapa jarak zona merah dari batas likuifaksi di Sibalaya Utara?
3	SGI	26/11/2019	Menurut informasi dari seorang pegawai BPBD bahwa bantuan saat ini belum ada yang bersumber dananya dari pemerintah. Apakah informasi tersebut benar?
4	SIGI	26/11/2019	Bagaimana perlakuan kepada WTB Desa Kabobona yang telah bertanda tangan di surat pernyataan bersedia ke huntap dan mereka ingin membatalkan kembali?
5	SIGI	25/11/2019	Saya bersedia pindah ke huntap karena menurut informasi sebelumnya kami masuk zona merah dan tidak mendapatkan dana stimulan. Karena sekarang zona merah ditarik, saya tidak bersedia ke huntap dan saya lebih memilih dana stimulan.
6	SIGI	25/11/2019	Menurut informasi dari Bupati Sigi bahwa zona merah di Desa Langaleso ditarik, jadi mana informasi yang benar?
7	KOTA PALU	8/11/2019	Warga belum bersedia direlokasi karena zona merah belum jelas batasnya dan rumahnya masih bisa dihuni
8	KOTA PALU	8/11/2019	Informasi tentang zona merah selalu berubah-ubah dan belum ada ketegasan dari pemerintah secara tertulis
9	KOTA PALU	8/11/2019	Warga tinggal di zona merah, tetapi rumah hanya rusak sebagian dan masih bisa dihuni dan meminta kepastian apa bisa mendapatkan dana stimulan
10	KOTA PALU	8/11/2019	Beberapa warga yang rumahnya tidak layak huni dan berada di zona merah tidak bersedia direlokasi ke huntap. Alasannya mereka memiliki lokasi yang aman

			dan akan membangun rumah di lokasi tersebut dan meminta kejelasan mengenai dana stimulan apa bisa diperuntukkan untuk mereka
11	KOTA PALU	8/11/2019	Status lokasi huntap apakah menjadi hak milik atau hanya dipinjamkan oleh pemerintah? Dan lokasi yang ditempati saat bencana bagaimana statusnya? Apakah bisa digunakan untuk usaha pembuatan batako?
12	KOTA PALU	4/11/2019	Data nama Ibu Made tidak terdapat di data kelurahan untuk penerima stimulan atau huntap

Sumber: SIM Manual PIM, 2019

3. Media Penyampaian Permintaan Informasi dan Masalah

Penyampaian Permintaan Informasi dan Masalah sebagian besar dilakukan melalui tatap muka langsung dalam melakukan survey dalam rangka penyusunan LARAP, dan sebagian besar laporan berasal dari masyarakat dan aparat setempat.

4. Penyelesaian Permintaan Informasi dan Masalah

a. Permintaan Informasi dan Masalah Terselesaikan

Dari 12 PIM yang telah dikompilasikan terdapat PIM yang sudah diselesaikan atau dapat diselesaikan langsung oleh fasilitator di lapangan. PIM yang dapat diselesaikan di lapangan yaitu 12 PIM atau sebesar 100%. Sebagian besar permintaan informasi dan masalah terkait dengan hunian tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Permintaan Informasi dan Masalah Terselesaikan

No	Nama Kota/Kabupaten	Tanggal Pengaduan	Isi Pengaduan	Tema Aduan	Unit Organisasi/Unor/OPD	Unit Terkait	Lokasi Kejadian	Tanggal	Uraian Hasil Akhir
1	SIGI	27/11/2019	Terkait data <i>by name by address</i> , di Sibalaya Utara terdapat rumah tetapi pemiliknya ber-KTP di Kalimantan, dan terdapat warga yang memiliki gilingan di Sibalaya Utara. Bagaimana untuk solusinya?	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Safeguard	3 Sibalaya Utara	27/11/2019	Warga tersebut segera melapor ke desa dan diurus ke Pemda terkait dengan membawa seluruh bukti kepemilikan aset rumah yang sah
2	SIGI	27/11/2019	Apakah lahan calon huntau yang berasal dari Pak Kasim sudah dibeli pemerintah atau sudah dihibahkan? Dan berapa jarak zona merah dari batas likuifaksi di Sibalaya Utara?	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Safeguard	3 Sibayalaya Utara	27/11/2019	Pemda Sigi menerima hibah lahan Desa Sibalaya Utara untuk pembangunan huntau. Lokasi huntau tidak berada di zona merah/ZRB IV
3	SIGI	26/11/2019	Menurut informasi dari seorang pegawai BPBD bahwa bantuan saat ini belum ada yang bersumber dananya dari pemerintah. Apakah informasi tersebut benar?	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Safeguard	11 Kabobona	30/11/2019	Informasi itu tidak benar, hal ini disampaikan oleh Kepala BPBD Sigi Bapak Asrul secara langsung saat kegiatan sosialisasi. Yang ada adalah pemberian bantuan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah.
4	SIGI	26/11/2019	Bagaimana perlakuan kepada WTB Desa Kabobona yang telah bertanda tangan di surat pernyataan bersedia ke huntau dan mereka ingin membatalkan kembali?	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Safeguard	11 Kabobona	30/11/2019	Pemerintah sifatnya menganjurkan masyarakat untuk ikut program huntau karena pemerintah ingin menjaga warganya agar tidak terkena bencana di kemudian hari, namun jika warga menolak pindah maka Pemda tidak akan memaksa, tetapi pemerintah tentu tidak akan membangun fasilitas publik di zona merah kembali.

5	Sigi	25/11/2019	Saya bersedia pindah ke huntap karena menurut informasi sebelumnya kami masuk zona merah dan tidak mendapatkan dana stimulan. Karena sekarang zona merah ditarik, saya tidak bersedia ke huntap dan saya lebih memilih dana stimulan.	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Safeguard	2 Langaleso	30/11/2019	Belum terdapat perubahan terkait status zona merah, namun Pemda melalui BPBD siap mengakomodir jika di luar zona merah WTB diminta berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk bertemu BPBD terkait dana stimulant
6	Sigi	25/11/2019	Menurut informasi dari Bupati Sigi bahwa zona merah di Desa Langaleso ditarik, jadi mana informasi yang benar?	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Safeguard	2 Langaleso	30/11/2019	Belum terdapat perubahan terkait status zona merah, namun Pemda melalui BPBD siap mengakomodir jika di luar zona merah WTB diminta berkoordinasi dengan kepala Desa untuk bertemu BPBD terkait dana stimulan
7	KOTA PALU	8/11/2019	Beberapa warga yang rumahnya tidak layak huni dan berada di zona merah tetapi tidak bersedia direlokasi ke huntap. Alasannya mereka memiliki lokasi yang aman, dan akan membangun rumah di lokasi tersebut dan meminta kejelasan mengenai dana stimulan apa bisa diperuntukan untuk mereka? Status lokasi huntap apakah menjadi hak milik atau hanya dipinjamkan oleh pemerintah? Dan lokasi yang ditempati saat bencana bagaimana statusnya? Apakah bisa digunakan untuk usaha pembuatan batako?	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	BPB	Safeguard	Silae	8/11/2019	Pernyataan Kabid Logistik dan Kedaruratan menjelaskan bahwa apabila terdapat warga yang rumahnya rusak berat dan berada di zona merah dan mereka meminta membangun di lokasi lain dengan menggunakan dana stimulan maka bisa difasilitasi
8	KOTA PALU	8/11/2019	Beberapa warga yang rumahnya tidak layak huni dan berada di zona merah tetapi tidak bersedia direlokasi ke huntap. Alasannya mereka memiliki lokasi yang aman, dan akan membangun rumah di lokasi tersebut dan meminta kejelasan mengenai dana stimulan apa bisa diperuntukan untuk mereka? Status lokasi huntap apakah menjadi hak milik atau hanya dipinjamkan oleh pemerintah? Dan lokasi yang ditempati saat bencana bagaimana statusnya? Apakah bisa digunakan untuk usaha pembuatan batako?	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	BPB	Safeguard	Silae	8/11/2019	Pernyataan Kabid Logistik dan Kedaruratan menjelaskan bahwa untuk status kepemilikan huntap akan menjadi milik WTB yang menghuni dan untuk status lahan secara perdana masih milik warga.

9	KOTA PALU	4/11/2019	Data nama Ibu Made tidak ada di data kelurahan untuk penerima stimulan atau huntap Warga belum bersedia direlokasi karena zona merah belum jelas batasnya dan rumahnya masih bisa dihuni.	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman) Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	BPB	Safeguard	Petobo	4/11/2019	Askot menjelaskan bahwa jika rumah Ibu Made berada di zona merah maka harus mendaftar kembali di kelurahan agar terdaftar di penerima huntap.
10	KOTA PALU	8/11/2019	Info tentang zona merah selalu berubah-ubah belum ada ketegasan dari pemerintah secara tertulis	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Dinas Pertanahan/ATR BPN	Safeguard	Sillae	8/11/2019	Sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Pemerintah Daerah
11	KOTA PALU	8/11/2019	Warga tinggal di zona merah, tetapi kondisi rumah hanya rusak sebagian dan masih bisa di huni. Meminta kepastian apakah bisa mendapatkan dana stimulan	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Dinas Pertanahan/ATR BPN	Safeguard	Sillae	8/11/2019	Sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Pemerintah Daerah
12	KOTA PALU	8/11/2019		Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Dinas Pertanahan/ATR BPN	Safeguard	Sillae	8/11/2019	Sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Pemerintah Daerah

Sumber: SIM Manual PIM, 2019

Dari berbagai permintaan Informasi dan pengaduan masalah yang masuk terdapat beberapa yang dominan ditanyakan antara lain:

1. Status kepemilikan tanah warga yang berada di Zona Merah;
2. Status kepemilikan huntap yang diberikan pemerintah;
3. Informasi tentang huntap yang kurang jelas (terkait jumlah rumah, infrastruktur, dan lain sebagainya).